

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
DESA BUNTU TORPEDO KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AULIA PUTRI

20 0402 0195

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
DESA BUNTU TORPEDO KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

AULIA PUTRI

2004020195

Pembimbing:

Burhan Rifuddin, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Putri
NIM : 20 0402 0195
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Palopo, 26 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Aulia Putri

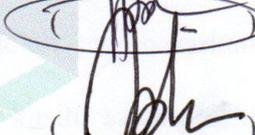
NIM 20 0402 0195

HALAMAN PENGESAHAN

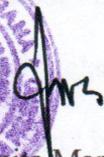
Skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Aulia Putri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020195, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 14 Sya'ban 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 26 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Penguji I | () |
| 4. Agusalm Sunusi, S.E., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 19891207201931005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia. Terkhusus kepada kedua orang tercinta Bapak Munir Lanuke dan Mama Hasna Hanapi, terima kasih telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mendoakan dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, dan tidak luput memberi dukungan dan semangat, baik secara moral maupun materil. Hanya doa dan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo. Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan. Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membina dan berupayameningkatkan mutu perguruan tinggi keagamaan negeri ini, tempat penelitimenimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.EL., M.El selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Muhammad Ilyas, S.Ag. M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, yang telah banyak mendukung dan memberikan petunjuk selama peneliti menimba ilmu pengetahuan.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Edi Indra Setiawan, S.E., M.M, dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Umar, S.E., M.SE.
4. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa siaga dalam memberi bimbingan serta arahan dengan tulus selama proses pengerjaan skripsi ini.

5. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. dan Agusalim Sunusi, S.E., M.M. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat akademik Akbar Sabani, S.El., M.E. terima kasih atas bimbingannya selama ini.
7. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan/karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Jamiluddin Jasman selaku Kepala Desa Buntu Torpedo, seluruh Aparat Desa Buntu Torpedo, dan Masyarakat Desa Buntu Torpedo, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan tambahan ilmu dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada saudara/saudariku tercinta, kakak Haryono Munir, Saiful Munir, Paramitha Munir, Sulkifli, Veby Aprilianti S.Kom, Muh. Hidayat, dan adik Aslam Nur dan Muh. Fauzan yang sudah ikut serta membantu dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini baik dalam hal keuangan, tenaga, waktu, dan pikiran, saya ucapkan banyak terima kasih.

11. Kepada sahabat seperjuangan yang sudah seperti saudara penulis, Sri Wahyuni, Winda Aryanto, Liansi, dan Nur Ainun yang selalu senantiasa kebersamai dan memberi dukungan serta motivasi kepada penulis.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (Khususnya kelas H), terkhusus juga kepada Puput dan Melisa Prayuda yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN MB Posko 24 Desa Pekaloa, terkhusus kepada Aidini Amalia Ramadan, Ina Pebriani, Nur Ainun dan Tarisah terimakasih telah mendukung dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terakhir, terima kasih untuk Aulia Putri, diri saya sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk, menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan ketegangan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih

banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 05 Oktober 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Te	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
كسرة	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-at fāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-maḍīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ -) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu‘‘ima
عُدُّوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf madda menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh *huruf syamsi yah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasinya huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al- Walīd Muḥammad bn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta'ālā
saw.	= ṣallahā 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah /2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
ADD	= Alokasi Dana Desa
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPD	= Badan Permusyawaratan Desa
BLT	= Bantuan Langsung Tunai

LPJ	= Laporan Pertanggungjawaban
LPPD	= Laporan Penyelenggaraan Peemerintah Daerah
LKPD	= Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
PLD	= Pendamping Lokal Desa
PMD	= Pemeberdayaan Masyarakat
RKPD	= Rencana Kerja Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	15
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Definisi Istilah	32

E. Sumber Data	34
F. Informasi/ Subjek Penelitian	35
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Instrumen Penelitian.....	37
I. Teknik Analisis Data	46
J. Teknik Pengabsahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S An-Nahl 101	23
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Laporan Data Penduduk Desa Buntu Torpedo	55
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 1.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Buntu Torpedo	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Daftar Informan

Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Hasil Pembangunan Desa

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Aulia Putri 2024 “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa BuntuTorpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Burhan Rifuddin, S.E., M.M.

Skripsi ini membahas tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Buntu Torpedo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengukuran efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dilihat dari kesesuaian antara hasil pembangunan pelaksanaan alokasi dana desa dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran sesuai dengan RKPDes dari Pemerintah Desa Buntu Torpedo.

Kata Kunci: Efektivitas, pengelolaan, alokasi dana desa

ABSTRACT

Aulia Putri 2024 "Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Buntu Torpedo Village, Sabbang District, North Luwu Regency". Sharia Banking Study Program Thesis, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Burhan Rifuddin, S.E., M.M.

This thesis discusses the effectiveness of managing village fund allocation in Buntu Torpedo village. This research aims to find out the system and effectiveness of village fund allocation management in Buntu Torpedo village, Sabbang District, North Luwu Regency. This type of research uses a descriptive qualitative research model, where the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Measuring the effectiveness of managing village fund allocations can be seen from the conformity between the development results of implementing village fund allocations and what has been previously planned and determined. The results of the research show that the effectiveness of managing village fund allocation in Buntu Torpedo Village, Sabbang District, North Luwu Regency has been realized in accordance with community needs and is right on target in accordance with the RKPDes of the Buntu Torpedo Village Government.

Keywords: Effectiveness, management, allocation of village funds.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Pada daerah perkotaan mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur modern, sedangkan desa-desa seringkali tertinggal dalam hal akses terhadap layanan tersebut, khususnya yang terjadi di Desa Buntu Torpedo, yang proses pembangunan desanya bisa dikatakan sangat tertinggal dari desa-desa yang ada di Kecamatan Sabbang. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.¹

Ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat membawa perubahan baru dalam pembangunan desa, dimana kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di Kota atau perkotaan, tetapi pada saat membangun perekonomian Indonesia haruslah dimulai dari desa, karena desa

¹ Dr. Dies Nurhayati, M.Pd. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat.²

Kondisi perekonomian pedesaan begitu jauh dengan perkotaan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengelolaan sector ekonomi. Perekonomian perkotaan lebih dominan digerakkan oleh sektor industri dan jasa. Hal tersebut membuat investasi di perkotaan begitu besar dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian pedesaan di Indonesia lebih cenderung digerakkan oleh sector pertanian dan perkebunan.³

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian.⁴ Desa memiliki hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah desa perlu mendapatkan supervise dari pihak yang berada di atasnya. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.⁵

Desa Buntu Torpedo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Setiap desa dipastikan mendapatkan dana atau bantuan anggaran dari pemerintah yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan pelayanan publik mengurangi kemiskinan dan memajukan perekonomian desa tersebut.

² Minarni Anaci Dethan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas NusaCendana

³ Umar, S.E., M.S.E , *Perekonomian Pedesaan Indonesia, Pembangunan Pedesaan.*

⁴ Rahardjo, *Pengantar Sosiologi, Pedesaan Pertanian*, Gadjah Mada University.

⁵ Hilmi, Ramlawati, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli.*

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di desa melalui penetapan kebijakan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di desa Buntu Torpedo.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi desa-desa di seluruh negara, dan pengelolaan yang efektif dari Dana Desa dapat membuka peluang untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat lokal. Misalnya, dengan alokasi Dana Desa yang tepat dan penggunaannya yang efisien, desa-desa dapat mengembangkan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik, yang sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Selain itu, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi lokal melalui program-program pelatihan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta promosi produk lokal. Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa.⁶

Alokasi Dana Desa yang diberikan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban

⁶ Nova Sulastri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*

keuangan merupakan sebuah dimensi yang penting dalam pelaksanaan penggunaan keuangan termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya memperoleh bantuan keuangan yang terbatas dengan pengelolaan yang masih sangat sederhana, namun setelah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa yang diberlakukan sekarang ini, desa memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh desa penerima itu sendiri.⁷

Meskipun alokasi dana desa telah diberikan secara konsisten oleh pemerintah, terdapat kekhawatiran terkait efektivitas pengelolaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa isu yang sering muncul seperti kurangnya transparansi, ketidakefisienan penggunaan dana, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta rendahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.

Dengan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana desa, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan memverifikasi penggunaan dana tersebut. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan membantu memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah desa akan lebih bertanggung

⁷ Freddy Kawatu, Anita Kambey, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*

jawab atas hasil dan dampak dari penggunaan dana desa, dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.⁸

Dari latar belakang di atas, menjadi semakin jelas bahwa masalah pengelolaan keuangan desa menjadi suatu aspek yang krusial. Dana yang dialokasikan ke desa bukanlah sekadar jumlah kecil, melainkan merupakan sumber daya yang signifikan yang harus dikelola dengan cermat. Hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subjek dan objek program alokasi dana desa masih kurang matang. Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa bisa saja datang dari pihak luar atau bahkan keadaan alam dan social desa Buntu Torpedo. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindak lanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih maksimal.

Alasan peneliti memilih dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan alokasi dana desa (ADD) mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa, selain dana desa (DD) yang bersumber dari APBN. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin

⁸ Dr. Dies Nurhayati, M.Pd. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

program ini akan meningkatkan pelayanan publik di perdesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen yang baik dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Seiring dengan kebijakan alokasi dana desa yang semakin diperhatikan, dimensi manajemen dalam pelaksanaannya menjadi semakin penting. Dengan demikian, penelitian tentang "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara" akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan meningkatkan praktik pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif dan efisien.

Penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, memiliki dampak yang besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang alokasi dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan di tingkat desa, kita dapat mengevaluasi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting kepada pemerintah, lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa di tingkat lokal, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan aktif di Desa Buntu Torpedo dan sekitarnya.

B. Batasan Masalah

Tujuan pembatasan suatu masalah adalah untuk mencegah atau menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar

penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah luas lingkup hanya membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan social dan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Desa Buntu Torpedo

Untuk masyarakat Desa Borgo Satu, memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu dapat digunakan untuk membantu teori-teori dan pengetahuan baru yang sesuai dengan apa yang diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang dilakukan:

1. Arif Hidayatullah, Fatmawati, dan Amir Muhiddin tahun 2022 dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif serta instrument yang digunakan dalam penelitian in yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Pemerintah desa leu untuk anggaran dana desa tahun 2020 telah mengalokasikan dana desa untuk program pembangunan desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa baik dan efektif dengan memberikan bantuan modal usaha disetiap pegiat usaha mikro yang tersebar

diseluruh desa yang tidak atau yang kurang memiliki modal usaha dan juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk dikelola langsung oleh badan usaha milik desa dan ini akan menyasar pada bantuan berupa barang baik bibit tani, kain tenunan sejenisnya kepada setiap masyarakat yang memang membutuhkan.⁹ Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian.

2. Sartini Lasabuda tahun 2021 dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa diDesa Borgo Satu Kecamatan Belang Kaupaten Minahasa Tenggara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2020, faktor yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa pada desa Borgo satu, cara menanggulangi hambatan dan merealisasi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Borgo satu. Jenis penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif, dan untuk pengumpulan datanya dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta data pendukung berupa foto-foto dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2020 sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran sesuai dengan RKPDes dari

⁹ Hilmi, Ramlawati, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli*

Pemerintah Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap semua masyarakat di desa Borgo satu. Faktor yang menghambat dalam melaksanakan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa berupa dana yang belum ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten lalu ke pemerintah desa, sehingga pembangunan untuk kebutuhan masyarakat desa pada awal tahun belum terpenuhi semuanya dan berhasil dipenuhi oleh pemerintah pada akhir tahun. Dan juga sumber daya manusia yang kurang berpartisipasi dalam membantu menjalankan tugas dari Pemerintah Desa Borgo Satu.¹⁰ Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

3. Dadang Setiawan pada tahun 2022 dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa menurut pandangan Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi

¹⁰ Sartini Lasabuda, Ekonomi dan Bisnis Islam, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara”.

Dana Desa terdiri dari empat (4) tahap, yaitu penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahapan penerimaan Alokasi Dana Desa belum efektif karena dana yang ada di aloksikan bukan untuk pembangunan desa melaikan untuk menanggulangi penyebaran covid 19 yang sedang marak. Tahapan perencanaan sudah efektif karena sudah melaksanakan kegiatan musrembangdesa dengan program kerja yangterlaksana. Pada tahapan pelaksanaan atas program kerja berupapembangunan fisik dan non fisik sudah terealisasikan anggaran. Tahapan pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian sudah efektif dengan adanya Surat Pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di tinjau dari ekonomi Islam, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggungjawab yang ada di Desa masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi pembangunan Islam.¹¹ Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian

4. Jovanca Mamuja, Freddy Kawatu dan Anita Kambey pada tahun 2021 dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea Satu tahun 2016-2019, hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu, cara menanggulangi

¹¹ Dadang Setiawan, Ekonomi Syari’ah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan analisis deskriptif eksploratif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara kepada unsur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2016-2019 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea satu yaitu tahun 2016 (100%), 2017 (97,80%), 2018 (99,80%), dan 2019 (100%). Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD. Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan terkait pengelolaan alokasi dana desa.¹² Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian

5. Hilmi dan Ramlawati tahun pada tahun 2020 dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Silondou tahun 2014-2019, (2) hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Silondou, (3) cara menanggulangi hambatan

¹² Jovanca Mamujaja, Freddy Kawatu dan Anita Kambey, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di DesaSeaSatu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”.

dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Silondou. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2014-2019 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Silondou yaitu tahun 2014 (98,98%), 2015 (100%), 2016 (100%), 2017 (98,24%), 2018 (100%), dan 2019 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Silondou adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi , dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.¹³ Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

¹³Hilmi, Ramlawati “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli*”.

B. Deskripsi Teori

1. Efektivitas

a. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektif menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisien menurutnya adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).¹⁴

b. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.¹⁵

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi untuk pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan sebuah organisasi. Ada 2 pendekatan dalam menilai keefektivan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan

¹⁴ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawann Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010)

¹⁵ Sartini Lasabuda, *Ekonomi dan Bisnis Islam, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kaupaten Minahasa Tenggara"*.

mengukur keefektivan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektivan.¹⁶

Menurut Mardiasmo, Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.¹⁷

Efektivitas dapat mengukur keberhasilan suatu lembaga organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif, ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi dan menjadi sumber dalam mencapai tujuan. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang sudah terealisasi sesuai target dan rancangan sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.¹⁸

c. Pengukuran Efektivitas

¹⁶ Minarni Anaci Dethan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol. 7, No.1, hal 15 – 19

¹⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.

¹⁸ Emir Ramadhana, *Teori Efektivitas*, Medan Universitas Sumatera Utara.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang telah disepakati dengan hasil rencana yang sudah terwujud. Dapat dikatakan tidak efektif, jika antara usaha dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.¹⁹

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian yaitu :

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi ada pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai strategi yang telah ditetapkan

¹⁹ Budhi Setianingsih dan Endah Setyowati, “Efektivitas Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) (Studi pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Malang)” .

artinya kebijakan harus mampu menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin dikekatkan pada tujuannya.

Ada beberapa faktor pendukung dalam menentukan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, yaitu:

a) Kemampuan Aparat Desa

Kemampuan aparat desa sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemampuan aparat desa yang

tergolong cukup baik menjadi salah satu faktor pendukung yang turut menyukseskan pengelolaan alokasi dana desa.

Pengelolaan alokasi dana desa sendiri tidak mungkin dapat berjalan secara efektif jika petugas yang bertanggungjawab untuk mengelola anggaran kurang teliti maupun cermat dalam proses pengarsipan.

b) Partisipasi Masyarakat

Faktor kedua yang menjadi faktor pendukung dalam efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa adalah tingginya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dalam penggunaan dana yang bersumber dari alokasi dana desa.

Partisipasi masyarakat baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dukungan terhadap program-program yang akan dibentuk. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka akan terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk memajukan desanya sangat tinggi pula.

c) Kebijakan Pemerintah

Dalam pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan pemerintah sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya kebijakan pemerintah maka pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan alokasi dana desa akan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

d) Fasilitas dan Infrastruktur

Dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, dibutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang baik guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas.²⁰

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam KBBI berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²¹

²⁰ Sartini Lasabuda, Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara”.

²¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern)

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berartipula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993).Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.²²

Nanang Fattah dikutip dari Ike Rus Tanti berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang dtampilkan oleh seseorang manejer atau pemimpin, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai efektif dan efesien.²³

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam

²² Dadang Setiawan, Ekonomi Syari’ah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”.

²³Ike Rus Tanti, *Efektivitas dan Dampak Penggunaan Alokasi DanaDesa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, UMM*.

menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.²⁴

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengidentifikasi bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan

²⁴ Terry, *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*

anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.²⁵

b. Sistem Pengelolaan

Ada beberapa sistem dalam pengelolaan alokasi dana desa antara lain:

a) Perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai gagasan yang menjelaskan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui prosedur yang logis. Tahap perencanaan adalah proses dimana penentuan apa yang harus tercapai secara jangka panjang dengan menetapkan kondisi masa depan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Dalam konteks alokasi dana desa, perencanaan keuangan desa merupakan tahapan pertama dalam pengelolaan keuangan desa.

Didalam proses perencanaan, pemerintah desa sebagai pihak yang mempunyai kuasa dalam penggunaan ADD yang akan mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan perwakilan masyarakat yang ada di Desa Buntu Torpedo untuk melaksanakan musyawarah yang membahas tentang rencana penggunaan anggaran desa, termasuk didalamnya pengelolaan ADD.

²⁵ Burhanuddin, *Pengelolaan organisasi sesuai kepentingannya*

Dalam proses perencanaan, ada yang dinamakan perencanaan model partisipatif. Perencanaan model partisipatif merupakan pendekatan perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Dalam perencanaan partisipatif, masyarakat diposisikan sebagai aktor utama pembangunan. Perencanaan partisipatif memiliki beberapa prinsip, di antaranya transparansi dan akuntabilitas dan kesepakatan pada semua tahapan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا
 إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja”. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Proses perencanaan dapat dikatakan efektif apabila penggunaan anggarannya telah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah.

b) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap pelaksanaan merupakan pengambilan akan tindakan atau rencana yang dirancang secara detail, yang kemudiandiimplementasikan atau sering disebut dengan aplikasi.

Tahap pelaksanaan dalam pengalokasian dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dalam hal pembangunan desa. Tahap pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dengan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat agar program pembangunan yang dilaksanakan bisa terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap pelaksanaan dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat desa dan program yang dikerjakan dapat terselesaikan dengan baik.

c) Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa merupakan kegiatan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periodetertentu. Kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut

terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes harus di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan efektif apabila laporan yang dibuat dapat disusun dengan baik dan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

d) Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap yang sangat penting dilakukan agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pengawasan dilakukan terhadap jalanya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan.

Proses pengawasan dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan efektif apabila pengawasan yang dilakukan telah menjamin pelaksanaan program alokasi dana desa berjalan efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan dan pengawas telah

memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁶

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. Jumlah penduduk desa
- c. Angka kemiskinan desa
- d. Luas wilayah
- e. Tingkat geografis desa.²⁷

²⁶ NovaSulastrri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabpaten Muna, Jurnal Skripsi Universitas Halu Oleo Kendari.*

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman keuangan pengelolaan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh pemerintah untuk Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).²⁸

Dalam mengelola anggaran, kejujuran adalah kewajiban yang tidak dapat di eksekusi kecuali penerapan prinsip transparansi anggaran. Oleh karena itu, berdasarkan aturan, melakukan transparansi anggaran itu wajib. Dalam pandangan islam, mengindari transparansi anggaran adalah ketidaktaatan. Penerapan nilai-nilai dasar hokum islam dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting dalam mengantisipasi kebocoran.²⁹

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desadalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

²⁷ Duval Ardiansyah, *Efektifitas pengelolaan keuangan desaAlokasi DanaDesa(ADD) di desakedayunan kecamatan kabat kabupaten Banyuwangi*, Universitas Jember.

²⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang “*Pedoman Pengeloan Keuannagn Desa*”
Pasal 18

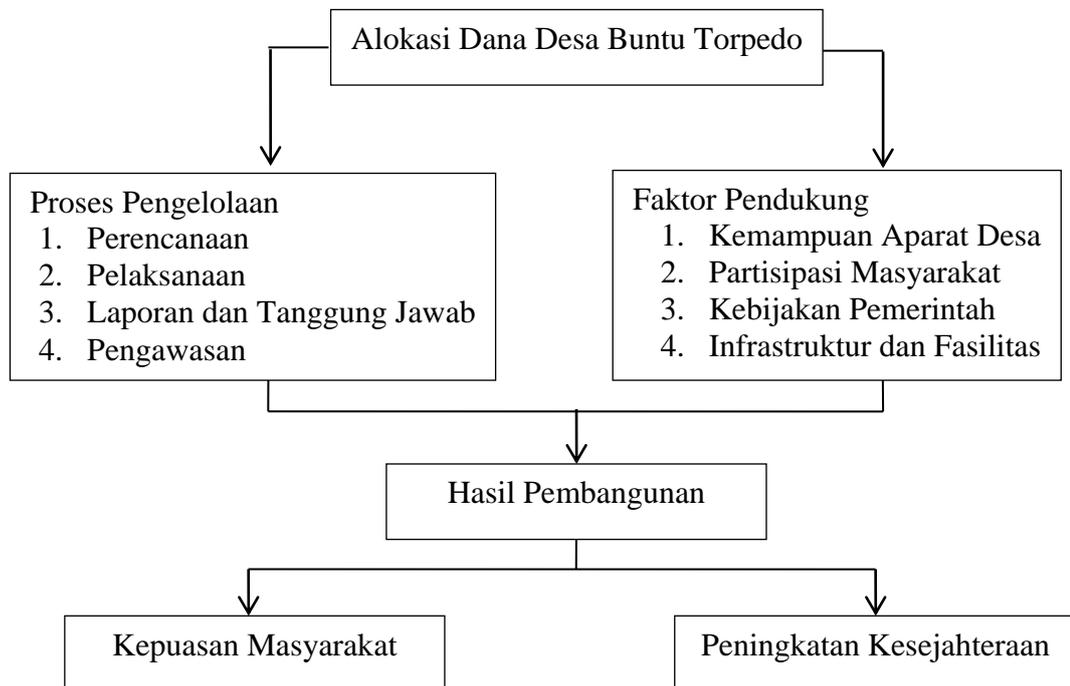
²⁹ Abdul Kadir Arno, *Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Islam*

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.³⁰

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bagian dari penelitian yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Adapun kerangka pikir penelitian ini yaitu:

³⁰ Novie Ilya Maharani, *Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan Tahun 2017*.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Alokasi Dana Desa :

Fokus pada evaluasi alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Buntu Torpedo serta bagaimana dana tersebut dikelola untuk berbagai program pembangunan di desa Buntu Torpedo. Setelah memahami kebutuhan pembangunan desa, langkah selanjutnya adalah melihat alokasi dana desa yang diterima oleh desa tersebut. Informasi ini penting untuk mengetahui sumber daya yang tersedia untuk mendukung program-program pembangunan.

Proses Pengelolaan :

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Dalam pengelolaan

Alokasi Dana Desa terdapat beberapa tahapan,yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan atau pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan.

Faktor pendukung :

Ada beberapa faktor pendukung dalam pengalokasian dana desa, yakni kemampuan aparat desa, partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, serta infrastruktur dan fasilitas. Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, tahap ini diletakkan setelah dalam factor pendukung untuk menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut.Kebijakan pemerintah dibutuhkan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengalokasian dana desa diperlukan infrastruktur dan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan konomi.

Hasil Pembangunan :

Hasil pembangunan dari pengelolaan alokasi dana desa yang baik dan terstruktur akan menciptakan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Buntu Torpedo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.³¹ Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kesubtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Peneliti memilih untuk menggunakan metode ini karena dengan memilih metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang fenomena yang diteliti.

³¹ Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, (cet v bandung: ALFBETA, 2020).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian . Lokasi penelitian bias di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat, Sesuai dengan judul penelitian ini, lokasi penelitian ini akan dilaksanakan diDesa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

C. Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana sistem dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Buntu Torpedo.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan atau sesuatu yang dilakukan

berhasil dengan baik. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu pencapaian tujuan.

2. Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam KBBI berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

3. Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari yang diterima oleh Kabupaten.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, data primer diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada subjek peneliti, jadi peneliti ini akan mencari dan menelusuri data riil melalui wawancara langsung kepada narasumber. Adapun yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat desa Buntu Torpedo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung diperoleh dari subjek peneliti yang berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Artinya, peneliti memperoleh data dari pihak kedua. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, skripsi, maupun tesis yang membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

F. Informasi/Subjek Penelitian

Informasi atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, baik itu orang maupun lembaga (perusahaan) yang ada dalam dirinya atau terkandung objek penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjangkau banyak informasi yang dibutuhkan secara mendalam dengan waktu yang singkat. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah dan Masyarakat Desa Buntu Torpedo.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama adalah

observasi participant, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi.³²

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan mengenai objek penelitian. Yang dimaksud penulis dalam tahap observasi ini ialah penulis terjun langsung di lapangan untuk mengamati apa yang terjadi dalam kenyataan yang ada, baik itu pengelolaan alokasi dana desa maupun manajemen keuangan desa, guna mencocokkan data-data yang sudah ada, hingga menggali informasi baru yang nantinya akan di dapatkan oleh penulis. Pada saat penulis melakukan observasi awal, penulis terlebih dahulu bertemu langsung dengan kepala desa dan setelah itu bertemu masyarakat desa Buntu Torpedo, penulis meminta izin untuk melakukannsebuah penelitian dan ini adalah observasi awal yang akandilakukan peneliti.
- b. Interview (wawancara), yaitu percakapan antara dua orang atau lebih, digunakan teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh informasi dan menemukan dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.³³ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan

³² Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, (Bandung:alfabeta) .

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung :Alfabeta) .

wawancara terhadap pemerintah dan masyarakat desa Buntu Torpedo yang menjadi informan di dalam penelitian ini.

- c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Metode ini digunakan peneliti dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁴ Adapun contoh dokumen yang akan diteliti ialah dokumen, arsip maupun catatan instansi yang didalamnya terdapat informasi dan data mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan rencana pembangunan desa.

H. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

diketahui oleh subyek penelitian. Iniberkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif ataupun pasif.³⁵

a. Pengertian Instrumen Penelitian

Sebelum mengenal berbagai jenis instrumen penelitian kualitatif, maka pahami dulu definisi dari instrumen penelitian. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait definisi instrumen penelitian. Diantaranya adalah:

- 1) Pendapat pertama bersumber dari Suharsimi Arikunto, menurutnya instrumen penelitian adalah alat dan fasilitas yang dipakai peneliti dalam proses pengumpulan data untuk memudahkan pekerjaan dan hasilnya menjadi lebih baik, cermat, lengkap serta konsisten sehingga penelitian yang dilakukan lebih mudah diolah.
- 2) Definisi kedua terkait instrumen penelitian dipaparkan oleh Sanjaya. Menurutya, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data penelitian, tujuan dilakukannya hal ini karena diharapkan penelitian mampu menghasilkan sesuatu yang diharapkan, bisa berupa data empiris.
- 3) Suryabrata juga menjelaskan definisi instrumen penelitian, yaitu sebuah alat yang dipakai untuk merekam keadaan atau aktivitas atribut-atribut psikologi istilah, atribut psikologis yang memang kurang familiar di telinga orang awam.

³⁵ Thalha Alhamid dan Budur Anufia Ekonomi Islam, RESUME: *INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA*

Dari definisi yang dipaparkan para ahli tersebut kemudian bisa ditarik kesimpulan, bahwa instrumen penelitian adalah seluruh alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Bentuknya bisa kuesioner, formulir, wawancara, dan lain-lain.

b. Jenis Instrumen Penelitian Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa instrumen penelitian yang sifatnya khas, beberapa kemudian tidak ditemukan di penelitian dengan metode lain. Misalnya pada penelitian kuantitatif. Secara garis besar, ada sekitar 6 (enam) jenis instrumen di dalam penelitian kualitatif dan berikut penjelasan lengkapnya:

1) Peneliti

Instrumen penelitian yang pertama dan utama di dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Tanpa peneliti maka sebuah penelitian tidak akan berjalan karena tidak ada pihak yang menentukan topik, fokus utama, dan mengumpulkan data.

Peneliti bertugas untuk menentukan fokus utama atau topik penelitian berdasarkan pemikiran subjektifnya. Kemudian bertugas untuk mengumpulkan data penelitian lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

2) Panduan Wawancara

Instrumen yang kedua adalah panduan wawancara, yakni sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan

dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Panduan ini berisi informasi data narasumber dan daftar pertanyaan yang diajukan.

Panduan wawancara menjadi pegangan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan tidak diberikan kepada narasumber. Sebab narasumber cukup menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk menjaga kebenaran atau validitas apa yang disampaikan.

Ada dua jenis panduan wawancara yang berbeda yaitu Panduan Wawancara Tidak Terstruktur dan Panduan Wawancara Terstruktur. Keduanya memiliki perbedaan khas, dimana satunya menggunakan istilah Panduan dan yang satunya menggunakan istilah Pedoman.

1. Panduan Wawancara Tidak Terstruktur, Panduan ini berupa point-point daftar pertanyaan yang pilihan jawabannya belum disiapkan. Biasanya jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan adalah penjelasan tentang sebuah hal, bukan penyebutan. Oleh karena itu, jawaban dalam model ini adalah jawaban yang panjang lebar dan meluas. Informan bisa saja menjawab banyak hal karena memang menginginkan penjelasan. Dalam penelitian kualitatif, hal inilah yang banyak dilakukan. Jenis ini sering juga disamakan dengan model Wawancara Mendalam (Depth Interview).
2. Panduan Wawancara Terstruktur, Jenis ini adalah daftar pertanyaan yang sudah memiliki pilihan jawaban. Bentuknya

hampir mirip dengan kuesioner dalam penelitian Kuantitatif, tetapi tidak memiliki skor atau penilaian. Hanya saja, pertanyaan yang diajukan sudah diberikan pilihan jawaban. Bentuknya sangat terstruktur dan tersusun secara sistematis dari awal hingga akhir. Misalnya pertanyaan, Bagaimanakah cara penyampaian informasi tentang bencana alam yang sering terjadi ke anggota masyarakat? Pilihan jawabannya adalah :

- A. Melalui media sosial yang dimiliki warga.
- B. Melalui orang tua masing-masing dalam sebuah keluarga.
- C. Melalui papan pengumuman di desa.
- D. Melalui surat pemberitahuan kepada warga.
- E. Melalui forum pertemuan warga.
- F. (lain-lain, sebutkan).

3) Angket (Kuesioner)

Instrumen penelitian kualitatif juga bisa dalam bentuk angket penelitian atau kuesioner. Angket sendiri bisa dikatakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data penelitian yang paling banyak digunakan. Sebab mudah, sederhana, dan praktis.

Lewat angket, peneliti bisa mendapatkan data tanpa perlu bertatap muka dengan narasumber. Sebab bisa dibagikan secara daring. Angket sendiri disusun dalam bentuk daftar pertanyaan lengkap dengan jawaban.

Angket biasanya digunakan untuk pertanyaan yang memuat penilaian personal dari narasumber. Misalnya tingkat kepuasan, penilaian kualitas sebuah produk maupun program, dan sejenisnya.

Ada beberapa jenis angket, yaitu angket terbuka (tidak berstruktur) dan angket tertutup (berstruktur). Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan jawaban bebas sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Contohnya “Bagaimana pendapat Anda mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa Buntu Torpedo?”. Sedangkan angket tertutup adalah jenis angket yang setelah rumusan pertanyaannya disediakan pula alternatif jawaban yang dapat dipilih responden.

Angket tertutup dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu angket tertutup dengan pertanyaan tertutup dan angket tertutup dengan pertanyaan terbuka, serta angket berstruktur dengan jawaban singkat. Angket tertutup dengan pertanyaan tertutup ialah angket yang telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih responden tanpa kemungkinan jawaban lain. Contohnya antara lain: “Bagaimana pendapat Anda terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Buntu Torpedo?”

(a) Sangat baik (b) Baik (c) Cukup (d) Kurang (e) Sangat kurang

Sedangkan angket tertutup dengan pertanyaan terbuka adalah jenis pertanyaan angket dengan alternatif jawaban berbentuk pilihan ganda, tetapi peneliti berasumsi dari jawaban yang telah disediakan untuk setiap pertanyaan mungkin tidak ada jawaban yang sesuai.

Karena itu, responden perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban lain.

Contoh angket tertutup dengan pertanyaan terbuka adalah sebagai berikut:

“Pengalokasian dana desa yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sesuai prosedur?”

- (a) Prosesnya jelas
- (b) Ada partisipasi masyarakat
- (c) Prosesnya transparan
- (d) (isi sesuai pendapat Anda)

Adapun angket berstruktur dengan jawaban singkat adalah kombinasi antara angket terbuka dan angket tertutup. Berikut contohnya: “Bagaimana pendapat Anda tentang pengalokasian dana desa di desa Buntu Torpedo?”.

4) Alat Tulis

Instrumen penelitian selanjutnya adalah alat tulis, mencakup buku atau kertas dan pena atau pensil. Fungsinya adalah menjadi media bagi peneliti untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan pengamatan (observasi).

Meskipun sekarang sudah era digital, namun tidak semua lokasi dimana data dikumpulkan mendukung peneliti membawa perangkat elektronik. Selain itu mencatat secara manual kadang terasa lebih mudah untuk dilakukan. Jadi, setiap kali penulis melakukan observasi kelapangan usahakan selalu membawa alat tulis. Tidak harus memakai kertas atau buku tebal dan berukuran besar. Bisa hanya buku kecil seukuran sticky notes. Contoh alat tulis yang dapat digunakan ialah berupa buku dan pena.

5) Alat Rekam

Instrumen penelitian kualitatif berikutnya adalah alat rekam, sesuai namanya alat ini digunakan untuk merekam kejadian maupun hasil wawancara. Biasanya dalam bentuk rekaman suara, bisa menggunakan fitur rekaman di smartphone. Paling praktis memang rekaman suara, sebab perangkat bisa diletakan dimana saja tanpa perlu melakukan pengaturan. Namun, alat perekam juga bisa dalam bentuk video. Misalnya saat observasi di lapangan dan mendapati kondisi sekitar pasca penerapan suatu ilmu baru. Kondisi perubahan sebelum

dan sesudah bisa difoto dan bisa direkam. Sehingga meningkatkan kredibilitas data yang dikumpulkan.

6) Dokumen

Terakhir adalah dokumen yang juga bisa disebut dengan istilah literatur. Jadi, dalam penelitian kualitatif ada proses pengumpulan data dengan cara studi literatur. Artinya peneliti membaca sejumlah dokumen untuk mendapatkan data terkait objek penelitian.

c. Kriteria Instrumen Penelitian yang Baik

Jika membahas mengenai instrumen penelitian kualitatif maka akan membahas juga mengenai kriteria ideal dari instrumen tersebut. Instrumen penelitian yang jenisnya banyak kemudian perlu dipilih atau dikombinasikan sesuai kebutuhan.

Pilihan dan kombinasi yang diambil haruslah menghasilkan data valid. Maka instrumen penelitian idealnya memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

1) Kredibilitas

Kriteria pertama yang harus dipenuhi adalah kredibilitas, dimana instrumen penelitian harus bisa dipercaya dan terjamin kebenaran data yang diberikan. Oleh sebab itu, utamakan instrumen yang mampu memberi jaminan kebenarannya.

2) Transferabilitas

Kriteria kedua adalah transferabilitas, yaitu instrumen yang mampu menyajikan data yang bisa diaplikasikan kepada kelompok

lain. Data yang diperoleh bisa diaplikasikan atau bisa dikirimkan ke pihak lain dengan mudah. Artinya, data ini wujudnya ada.

3) Dependabilitas

Berikutnya adalah dependabilitas, yaitu tingkat mutu atau kualitas data yang diberikan oleh instrumen penelitian kualitatif yang akan digunakan. Data yang didapatkan haruslah berkualitas agar mudah dipahami dan dianalisis untuk ditemukan hasil penelitiannya.

4) Konfirmabilitas

Terakhir adalah konfirmabilitas, artinya data dari instrumen penelitian bisa dikonfirmasi. Misalnya ditelusuri kebenarannya, dilacak catatannya di lapangan, dan lain sebagainya. Sehingga saat dipertanggung jawabkan bisa dibuktikan kebenarannya.

Jadi, sebelum menentukan instrumen penelitian kualitatif mana yang digunakan pastikan sudah memenuhi kriteria tersebut. Sehingga hasil data yang didapatkan selama proses penelitian dilakukan dijamin kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan.³⁶

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disusun ke dalam pola, memilih mana data yang dianggap penting

³⁶ Salma, <https://penerbitdeepublish.com/instrumen-penelitian-kualitatif/> Agustus 18, 2022

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data-data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan Data

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah pengumpulan data. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Makin lama di lapangan, jumlah data yang terkumpul akan semakin banyak dan bervariasi.

b. Reduksi Data

Data mentah yang telah terkumpul yang jumlahnya sangat banyak perlu di reduksi, berarti mengurangi data. Reduksi dilakukan dengan memilih data yang dianggap penting, merupakan data yang baru yang belum pernah dikenal, data yang unik yang berbeda dengan data yang lain dan merupakan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Untuk

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta).

mereduksi data peneliti juga berbekal dari teori tertentu.³⁸ Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data adalah sebagai berikut:

- 1) Memilih data yang dianggap penting
- 2) Membuat kategori data
- 3) Mengelompokkan data dalam setiap kategori setelah data direduksi.

Dalam tahap mereduksi data ini, ada beberapa hal yang juga harus perlu dilakukan seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

a). Melakukan seleksi

Data yang akan dipilih atau disederhanakan harus melalui proses seleksi yang ketat. Artinya, peneliti harus benar-benar memilih data dengan tepat mengenai mana data yang ingin direduksi dan lain sebagainya.

b). Meringkas

Setelah memilih data berdasarkan proses yang ketat, selanjutnya data yang terpilih ini harus diringkas berdasarkan uraian singkat. Uraian ini harus disampaikan dengan jelas, lugas, dan juga informasi yang disampaikan tetap harus sesuai dengan data yang sebenarnya sehingga tidak mengurangi atau menambah esensi lain di dalamnya.

c). Menggolongkan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta) .

Setelah meringkas atau melakukan uraian singkat, tahap terakhir dari mereduksi data adalah dengan menggolongkan berbagai data yang sudah diringkas tadi menjadi beberapa pola. Pola tersebut dibagi atau digolongkan dengan pola yang lebih luas lagi.

Dalam hal ini, Anda bisa mengelompokkan atau menggolongkan data dengan berbagai jenis, misalnya dalam jenis yang sesuai konsep, kategori, atau bahkan tema-tema. Dengan demikian, proses reduksi data ini merupakan proses saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan juga penyajian data. Sehingga sifat reduksi data ini tidak bisa dilakukan dalam sekali jadi, melainkan harus berkali-kali, bolak-balik, dan sebagainya agar perkembangan data yang disajikan interaktif dan sekuensial, atau bahkan melingkar. Dengan demikian, data tersebut memiliki ketajaman yang baik sehingga bermanfaat dan informasinya dapat disampaikan dengan jelas.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data di susun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Jika dalam penelitian kuantitatif, penyajian datanya dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya.

Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. Menarik Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.³⁹

J. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah standar validitas dari sebuah data yang diperoleh. Menurut Sugiyono, terdapat tiga macam triangulasi yang menentukan keabsahan data yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber yang sama menggunakan teknik berbeda.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).

- c. Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Maka dari itu dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda.⁴⁰

Ada beberapa cara untuk memastikan konsistensi antara berbagai sumber data dan bagaimana kita akan menangani kontradiksi atau inkonsistensi dalam data, antara lain yaitu:

1. Menentukan Standar Data, Sebelum memulai memvalidasi data, kita perlu menentukan standar data yang ingin di ikuti. Standar data adalah aturan dan spesifikasi yang mengatur bagaimana data harus diformat, disusun, diberi nama, dan didokumentasikan. Standar data dapat membantu menjaga konsistensi data di berbagai sumber, sistem, dan pengguna. Beberapa contoh standar data adalah kamus data, konvensi penamaan, model data, dan skema metadata.
2. Lakukan Pembuatan Profil Data, Pembuatan profil data adalah proses memeriksa dan menganalisis data untuk menemukan karakteristik, kualitas, dan hubungannya. Pembuatan profil data dapat membantu mengidentifikasi dan mengukur inkonsistensi data, seperti nilai yang hilang, duplikat, outlier, kesalahan, atau anomali.
3. Terapkan Aturan Validasi Data, Aturan validasi data adalah kriteria dan ketentuan yang digunakan untuk memeriksa

⁴⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

danmemverifikasi apakah data memenuhi standar dan harapan data. Aturan validasi data dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki ketidakkonsistenan data, seperti nilai yang tidak valid, format yang tidak cocok, unit yang tidak konsisten, atau tipeyang tidak kompatibel.

4. Gunakan Fungsi Transformasi Data, Fungsi transformasi data adalah operasi dan metodeyang digunakan untuk memodifikasi dan memanipulasi data untuk meningkatkan konsistensi, kualitas, dan kegunaannya. Fungsi transformasi data dapat membantu menyelesaikan dan mencegah inkonsistensi data, seperti variasi, perbedaan, redundansi, atau konflik. Fungsi transformasi data dapat dilakukan pada berbagai aspek data seperti nilai, format, struktur, atau hubungan.
5. Menerapkan Pemeriksaan Konsistensi Data, Pemeriksaan konsistensi data adalah prosedur dan pengujian yang digunakan untuk memantau dan memastikan bahwa data tetap konsisten selama tahap validasi dan seterusnya. Pemeriksaan konsistensi data dapat membantu mencegah dan mengurangi ketidakkonsistenan data, seperti perubahan, pembaruan, penghapusan, atau penambahan.
6. Meninjau dan Mendokumentasikan Hasil Validasi Data, Langkah terakhir untuk memastikan konsistensi data pada tahap validasi adalah dengan meninjau dan

mendokumentasikan hasil validasi data. Meninjau dan mendokumentasikan hasil validasi data dapat membantu mengevaluasi dan mengkomunikasikan status konsistensi data, masalah, dan tindakan. Meninjau dan mendokumentasikan hasil validasi data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti laporan, dasbor, log, atau metadata.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi jenis triangulasi sumber yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung kepada Pemerintah dan masyarakat di Desa Buntu Torpedo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Buntu Torpedo merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis, Desa Buntu Torpedo berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Bakka

Sebelah Selatan : Desa Terpedo Jaya, Kec. Sabbang Selatan

Sebelah Barat : Desa Tulak Tallu

Sebelah Timur : Desa Pengkendekan, Mekar Sari Jaya, Kec. Baebunta

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Buntu Torpedo adalah $\pm 21.5 \text{ Km}^2$ yang pemanfaatannya berupa:

Pemukiman, luas areal : $\pm 264 \text{ Ha}$

Prasarana umum, luas areal : $\pm 3 \text{ Ha}$

Lahan perkebunan, luas areal : $\pm 1.055 \text{ Ha}$

Lahan persawahan, luas areal : $\pm 618 \text{ Ha}$

Hutan tanaman rakyat : ± 210 Ha

Melihat komposisi pemanfaatan lahan, yang paling besar adalah untuk lahan pertanian dan perkebunan yang cukup besar. Luas hutan masyarakat yang ada juga masih potensial baik untuk pengembangan industri. Kondisi ini didukung oleh letak Desa Buntu Torpedo yang cukup strategis, yaitu berada dekat dari Ibu Kota Kecamatan Sabbang serta dilalui oleh jalan provinsi.

Struktur lokasi Desa Buntu Torpedo pada dasarnya terdiri atas dataran rendah dan pegunungan, dimana suhu udara rata-rata berkisar 31°C dengan curah hujan rata-rata 3.010 mm/th.

Desa Buntu Torpedo terdiri dari 5 (lima) Dusun, yaitu:

- Dusun Pantonangan terdiri dari 4 RT
- Dusun Padang Sarre terdiri dari 3 RT
- Dusun Durian Kunyi terdiri dari 2 RT
- Dusun Tinimpong terdiri dari 2 RT
- Dusun Masarang terdiri dari 1 RT

3. Lembaga/Kelompok Desa

Desa Buntu Torpedo memiliki beberapa kelembagaan/kelompok, di antaranya:

- Lembaga/Organisasi Pemuda
- Lembaga/Organisasi Perempuan

- Lembaga Adat
 - Lembaga Tani
4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Buntu Torpedo sampai dengan Bulan Februari 2023 sebanyak 715 KK atau 2767 jiwa yang terdiri dari:

- Penduduk laki-laki sebanyak 1431 jiwa
- Penduduk perempuan sebanyak 1337 jiwa
- Penduduk beragama islam sebanyak 2340 jiwa
- Penduduk yang beragama kristen sebanyak 472 jiwa

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Laporan Data Penduduk Desa Buntu Torpedo Bulan
Maret 2024**

No.	Dusun	Jumlah Penduduk Saat Ini			Jumlah		
		L	P	Jumlah Jiwa	RT	Luas Wil	KK
1.	Pantonangan	345	341	686	4	662	172
2.	Padang Sarre	421	383	802	2	1210	160
3.	Durian Kunyi	346	326	672	2	760	145
4.	Tinimpong	189	187	376	2	675	135
5.	Masarang	133	107	240	1	493	105
Jumlah		1434	1344	2785	11	3800	922

Sumber : Profil Desa Buntu Torpedo Tahun 2024

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Buntu Torpedo tergantung dari mata pencaharian mayoritas masyarakatnya dari perkebunan dan pertanian. Sebagian masyarakat Desa Buntu Torpedo menjadi pekerja bangunan, pedagang dan buruh tani, serta pekerjaan lainnya.

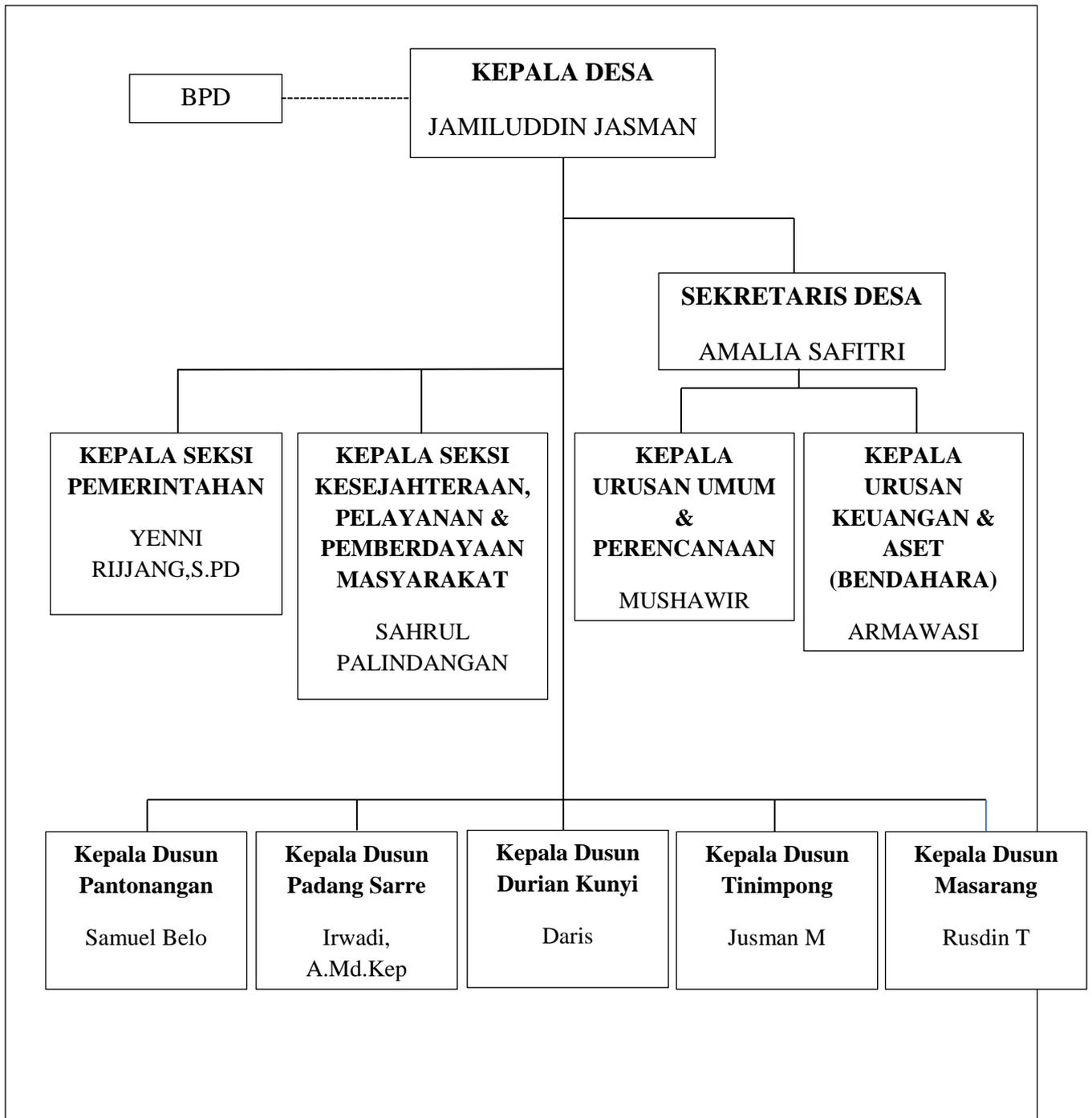
Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup masyarakat karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal keterampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih tingginya harga barang dan kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Buntu Torpedo, namun wilayah lain juga mengalami keadaan yang sama.

Seiring dengan berjalannya program pengalokasian dana desa di Desa Buntu Torpedo, tingkat pendapatan masyarakat mulai stabil. Tingkat pendapatan masyarakat yang stabil dapat dicapai berkat berjalannya program alokasi dana desa, karena program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

6. Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka perangkat kerja organisasi menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dan juga dilengkapi dengan

tim pengawas. Adapun struktur organisasi Desa Buntu Torpedo sebagai berikut:



Gambar 1.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Buntu Torpedo

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo

Pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 dengan dasar PP NO. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini dipertegas dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk dapat menggunakan dana desa yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Buntu Torpedo agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata serta terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo yaitu Bapak Jamiluddin Jasman mengenai sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo, yaitu sebagai berikut:

“Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo itu pengelolaannya dilakukan secara terbuka/transparan dan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di Desa Buntu Torpedo walaupun hanya melalui perwakilan”⁴¹.

Hal sejalan juga diungkapkan oleh Ibu Amalia Safitri selaku Sekretaris Desa Buntu Torpedo yang mengungkapkan bahwa:

⁴¹Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni 2024

“Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo bersifat umum dan terbuka yang dilakukan dengan proses tahapan yang baik”.⁴²

a. Perencanaan

Tahap pertama dari pengelolaan ADD adalah proses perencanaan. Proses perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Di dalam proses perencanaan, pemerintah desa sebagai pihak yang mempunyai kuasa dalam penggunaan ADD yang akan mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Buntu Torpedo untuk melaksanakan musyawarah/rapat desa. Kegiatan musyawarah ini akan membahas tentang rencana penggunaan anggaran desa, termasuk didalamnya pengelolaan ADD.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan anggota BPD mengenai tahapan pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan:

“Pada tahap perencanaan itu melibatkan pemerintah desa dan masyarakat Desa Buntu Torpedo, Kepala Desa mengadakan rapat/musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, kepala dusun, anggota organisasi-organisasi desa, dan perwakilan perempuan, diundang untuk membahas tentang perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, termasuk didalamnya rencana penggunaan anggaran”.⁴³

Kemudian wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Buntu Torpedo mengenai tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap perencanaan:

“Proses tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo dimulai dari tahap perencanaan dengan melakukan rapat/musyawarah desa dengan keterwakilan masyarakat dan pihak yang terkait seperti Anggota BPD, kepala dusun sebagai perwakilan masyarakat, pemuda, tokoh agama, dan perwakilan perempuan. Lalu setelah itu, dilakukan proses penganggaran melalui penyusunan APBDES dan kemudian pengalokasian, kemudian penyaluran lalu

⁴² Wawancara dengan Sekretaris Desa Buntu Torpedo Ibu Amalia Safitri, 25 Juni 2024

⁴³ Wawancara dengan anggota BPD Bapak Jabiruddin, 26 Juni 2024

pertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa, setiap aparat desa dan perwakilan masyarakat itu ikut andil dalam musyawarah desa dalam rangka membahas serta membantu menyusun perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan adalah proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pembelanjaan belanja desa yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di depan kantor desa.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman bahwa:

“Jadi, untuk mewujudkan prinsip keterbukaan itu, kita menyampaikan kepada semua unsur masyarakat melalui papan informasi dan kita membuat baliho agar semua masyarakat bias mengetahui apa saja yang kita kerjakan dalam tahun yang berjalan”.⁴⁵

Hal sejalan juga diungkapkan oleh Ibu Armawasi selaku Kaur Keuangan Desa Buntu Torpedo yang mengatakan bahwa:

⁴⁴ Wawancara dengan Sekretaris Desa Buntu Torpedo Ibu Amalia Safitri, 25 Juni 2024

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni

“Pemerintah Desa mewujudkan prinsip keterbukaan melalui papan informasi atau baliho transparansi, serta melakukan musyawarah LPPD”⁴⁶.

Pada tahap pelaksanaan dibutuhkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengelolaan alokasi dana desa serta dalam hal pembangunan kawasan pedesaan.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo:

“Tingkat partisipasi masyarakat di desa kita itu bias dikatakan sangat tinggi, terbukti dari setiap jenis kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan didesa itu kita selalu mengikut sertakan masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses pengerjaannya”⁴⁷.

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Amalia Safitri selaku sekretaris Desa Buntu Torpedo yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini masyarakat desa Buntu Torpedo sudah berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa”⁴⁸.

Kemudian wawancara peneliti bersama Bapak Darwis masyarakat Desa Buntu Torpedo, mengatakan bahwa:

“Menurut saya masyarakat sangat aktif berpartisipasi dan dilibatkan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa”⁴⁹.

⁴⁶ Wawancara dengan Bendahara Desa Buntu Torpedo Ibu Armawasi, 26 Juni 2024

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni

⁴⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa Buntu Torpedo Ibu Amalia Safitri, 25 Juni 2024

⁴⁹ wawancara dengan Bapak Darwis masyarakat Desa Buntu Torpedo, 26 Juni 2024

Adapun beberapa program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo itu terdiri dari dua jenis yaitu jenis fisik dan nonfisik.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman mengenai program pembangunan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo:

“Jadi, mengenai programnya itu ada beberapa program pembangunan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo itu ada dua jenis. Untuk jenis fisik ada pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan, rabat beton dan perbaikan sarana air bersih. Sedangkan, untuk jenis nonfisik itu ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan pemberdayaan perempuan”.⁵⁰

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Amalia Safitri selaku sekretaris Desa Buntu Torpedo yang mengatakan bahwa:

“Untuk program yang dilaksanakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa kita itu ada yang berbentuk fisik seperti pembangunan jembatan, rabat beton, pembangunan jalan tani dan perbaikan sarana air bersih, kemudian untuk nonfisik itu hanya ada dua yaitu pemberdayaan perempuan dan program BLT (Bantuan Langsung Tunai)”.⁵¹

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni 2024

⁵¹ Wawancara dengan Sekretaris Desa Buntu Torpedo Ibu Amalia Safitri, 25 Juni 2024

dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes harus di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa:

“Kita Kepala Desa itu melakukan pelaporan dalam setiap alokasi dana desa. Dana desa yang bersumber dari pusat itu pelaporannya dua kali dalam setahun, sedangkan dana desa yang bersumber dari daerah itu pelaporannya empat kali pertahun. Nah jenis laporannya itu ada laporan administrasi, dokumentasi, LPJ, LPPD, dan LKPD”.⁵²

Hal sejalan juga diungkapkan oleh Ibu Armawasi selaku Kaur Keuangan Desa Buntu Torpedo yang mengatakan bahwa:

“Jenis-jenis pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa Buntu Torpedo dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu LPJ, LPPD, LKPD, dan dokumentasi”.⁵³

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap yang sangat penting dilakukan agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pengawasan dilakukan terhadap jalanya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana

⁵² Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni 2024

⁵³ Wawancara dengan Bendahara Desa Buntu Torpedo Ibu Armawasi, 26 Juni 2024

yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan fisikmaupun pengelolaan keuangan.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman mengenai pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa:

“Untuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan dan anggota BPD itu sudah sangat baik, dimana di kecamatan itu ada yang namanya kasi PMD. Nah dimana kasi PMD dan BPD ini selalu turun tangan untuk mengecek setiap kita melaksanakan program dan membuat laporan untuk mengetahui apakah benar yang kita laporkan itu sudah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Jadi pengawasan pemerintahan kecamatan dan BPD dalam hal Alokasi Dana Desa itu sudah sangat baik dan bermanfaat.”⁵⁴

Kemudian wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Ibu Amalia Safitri yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah kecamatan memberikan pengawasan melalui pendampingan yang dibentuk oleh provinsi melalui pendamping lokal desa (PLD).”⁵⁵

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu kurangnya kapasitas aparat desa yang dimana kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola dana desa dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan, kemudian kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa, konflik kepentingan antara aparatur desa, masyarakat dan pemerintah

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni 2024

⁵⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Buntu Torpedo Ibu Amalia Safitri, 25 Juni 2024

dapat menghambat pengelolaan dana desa, keterbatasan sumber daya alam yang dapat membatasi pengembangan desa dan bencana alam yang bisa saja menghancurkan infrastruktur desa dan mempengaruhi pengelolaan dana desa itu sendiri.

2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Ada beberapa faktor pendukung dalam menentukan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, yakni kemampuan aparat desa, partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, serta fasilitas dan infrastruktur. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo:

“Tingkat partisipasi masyarakat di desa kita itu bias dikatakan sangat tinggi, terbukti dari setiap jenis kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan didesa itu kita selalu mengikut sertakan masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses pengerjaannya”.⁵⁶

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Awi masyarakat Desa Buntu Torpedo, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat Desa Buntu Torpedo sangat berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa”.⁵⁷

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman mengenai fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo:

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni 2024

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Awi masyarakat Desa Buntu Torpedo, 27 Juni 2024

“Jadi, mengenai fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa kita itu sudah tersedia, walaupun pendukung-pendukung ini sebenarnya belum begitu memadai untuk secara keseluruhan”.⁵⁸

Kemudian wawancara peneliti dengan Ibu Amalia Safitri selaku sekretaris Desa Buntu Torpedo yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa itu sudah cukup memadai”.⁵⁹

Untuk menentukan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa juga dapat dilihat dari kesesuaian hasil pembangunan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya:

“Iya sudah sesuai, karena program Alokasi Dana Desa itu harus dikerjakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan sudah ada dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Apabila program yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan maka hal tersebut bisa saja menjadi suatu masalah”.

Kemudian wawancara peneliti dengan anggota BPD yang mengatakan bahwa:

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni 2024

⁵⁹ Wawancara dengan Sekretaris Desa Buntu Torpedo Ibu Amalia Safitri, 25 Juni 2024

“Hasilnya sudah sesuai, karena semua program yang direncanakan itu sudah dijalankan sesuai dengan RKPDesa”.⁶⁰

Hasil pembangunan pengelolaan alokasi dana desa yang baik dan terstruktur sangat diharapkan agar dapat menciptakan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Buntu Torpedo.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman mengenai hasil program pembangunan yang telah dibuat:

“Kalau berbicara masalah kepuasan, kita tidak bisa menjamin bahwa program yang kita bangun itu bisa memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat, tapi jika dikatakan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat itu sudah pasti iya, contohnya kita membangun jalan tani yang dapat memberikan dampak positif, karena yang tadinya tidak ada akses kesawah/kekebun, tetapi dengan adanya jalan tani ini masyarakat sudah tidak kesusahan lagi”.⁶¹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Jabiruddin selaku anggota BPD Desa Buntu Torpedo, mengatakan bahwa:

“Kalau masalah kepuasan secara maksimal tentu tidak, karena mungkin bisa saja masih banyak keinginan masyarakat yang belum bisa terpenuhi. Tapi, kalau kepuasan dari program pembangunan yang sudah di nikmati iya pasti memuaskan dan bisa dikatakan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat”.⁶²

Pandangan itupun juga diutarakan oleh Bapak Darwis selaku masyarakat Desa Buntu Torpedo:

“Menurut saya hasil pembangunan yang telah dibuat sudah sangat memberikan kepuasan dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Buntu Torpedo”.⁶³

⁶⁰ Wawancara dengan anggota BPD Bapak Jabiruddin, 26 Juni 2024

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Desa Buntu Torpedo Bapak Jamiluddin Jasman, 25 Juni 2024

⁶² Wawancara dengan anggota BPD Bapak Jabiruddin, 26 Juni 2024

⁶³ wawancara dengan Bapak Darwis masyarakat Desa Buntu Torpedo, 26 Juni 2024

Hal yang sama juga di utarakan oleh Bapak Hasyim Abbas selaku masyarakat Desa Buntu Torpedo, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai masalah kepuasan bisa dibilang sebagian masyarakat sudah merasa puas karena dengan terlaksananya program-program alokasi dana desa itu sudah menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat. Contohnya, dengan pembangunan jalan tani maka kegiatan masyarakat di sawah sudah dipermudah”.

Kemudian wawancara peneliti dengan Ibu Najewang selaku masyarakat Desa Buntu Torpedo, yang mengatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat sudah merasakan dampak dari adanya program alokasi dana desa di desa buntu topedo ini, menurut saya dengan adanya program alokasi dana desa, masyarakat sudah memiliki akses fasilitas dan layanan yang lebih baik, seperti dengan adanya pembuatan jembatan kita sudah tidak kesusahan untuk mencari jalan, dengan adanya program alokasi dana desa ini juga telah memberikan dampak yang baik pada tingkat pendapatan masyarakat sehingga kami sebagai masyarakat merasa puas dengan terlaksananya program alokasi dana desa di Desa Buntu Torpedo”.

C. Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo

Sistem pengelolaan alokasi dana desa di desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dalam mensejahterakan masyarakat dan juga pemerataan semua pembangunan yang ada di desa Buntu Torpedo merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban, dan pengawasan desa untuk keperluan pembangunan desa dan untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di desa Buntu Torpedo agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan

terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di desa Buntu Torpedo.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah proses dimana penentuan apa yang harus tercapai secara jangka panjang dengan menetapkan kondisi masa depan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Dalam konteks alokasi dana desa perencanaan keuangan desa merupakan tahapan pertama dalam pengelolaan keuangan desa.

Didalam proses perencanaan, pemerintah desa sebagai pihak yang mempunyai kuasa dalam penggunaan ADD yang akan mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan perwakilan masyarakat yang ada di Desa Buntu Torpedo untuk melaksanakan musyawarah yang membahas tentang rencana penggunaan anggaran desa, termasuk didalamnya pengelolaan ADD.

Tahap perencanaan alokasi dana desa di desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang, telah sesuai dengan program-program kerja yang ada di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan ketentuan yang berlaku dimana diawali dengan pembentukan tim pelaksana di setiap proses perencanaan program-program kerja untuk pembangunan desa yang dilakukan dengan model partisipatif dalam setiap kegiatan musyawarah desa. Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku penanggungjawab operasional kegiatan, sekretaris

desa selaku penanggung jawab administrasi dan bendahara selaku kepala urusan keuangan dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan seluruh perwakilan lapisan masyarakat desa Buntu Torpedo. Musyawarah desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan desa Buntu Torpedo. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan yang dihasilkan adalah usulan dan harapan serta kebutuhan seluruh masyarakat desa Buntu Torpedo. Dari informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musyawarah desa dalam tahapan perencanaan di desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang itu dihadiri setiap perwakilan masyarakat.

Musyawarah-musyawarah yang terdapat dalam perencanaan ADD merupakan wujud dari partisipasi masyarakat desa dalam mengawal keuangan desa dalam membangun desa. Perencanaan ADD oleh pemerintahan desa Buntu Torpedo sudah sesuai alur perencanaan yang sesuai dengan peraturan kabupaten Luwu Utara, hal ini telah dikonfirmasi dari wawancara peneliti kepada beberapa narasumber yaitu perwakilan pihak pemerintah desa dan pihak perwakilan masyarakat. Narasumber menerangkan bahwasanya kegiatan musyawarah yang merupakan bagian dari perencanaan ADD telah dilaksanakan dengan baik. Maka dengan hal ini, pengelolaan ADD di desa Buntu Torpedo sudah efektif dalam hal perencanaan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap pelaksanaan merupakan pengambilan akan tindakan atau rencana yang dirancang secara detail, yang kemudian diimplementasikan atau sering disebut dengan aplikasi. Tahap pelaksanaan dalam pengalokasian dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat serta harus dilakukan secara terbuka.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Buntu Torpedo hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan program dalam pengelolaan alokasi dana desa sebagaimana ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana yang didalamnya melibatkan aparat desa dan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dibutuhkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, pada tahap ini bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dan aktif.

Dalam pelaksanaan program pembangunan Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa Buntu Torpedo telah mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari ADD. Pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat melalui papan informasi dan membuat baliho agar semua masyarakat bisa mengetahui apa saja program yang di kerjakan dalam tahun

yang berjalan serta pemerintah desa juga melakukan musyawarah LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Pada tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Buntu Torpedo ini, dari setiap program kegiatan pembangunan desa yang dilakukan baik dari segi pembangunan fisik yakni pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan, rabat beton, dan perbaikan sarana air bersih, serta dari segi nonfisik yakni program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan pemberdayaan perempuan dapat terselesaikan dengan baik dan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Buntu Torpedo, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban sudah efektif, dimana pemerintah Desa Buntu Torpedo melakukan pelaporan dalam setiap Alokasi Dana Desa. Dana desa yang bersumber dari pusat itu pelaporannya dua kali dalam setahun, sedangkan dana desa yang bersumber dari daerah itu pelaporannya empat kali pertahun. Adapun jenis laporan yang dibuat itu ada laporan administrasi, dokumentasi, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah), dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban telah disusun dengan baik oleh pemerintah Desa Buntu

Torpedo dan telah di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

d. Pengawasan

Tahapan pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo bisa dikatakan sudah efektif, karena pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan dan pihak anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) itu sudah sangat baik, dimana dari pihak kecamatan itu ada yang namanya kasi PMD (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat), dimana kasi PMD dan BPD ini selalu turun tangan untuk mengecek setiap pelaksanaan program dan membuat laporan untuk mengetahui apakah benar bahwa apa yang telah pemerintah desa laporkan itu sudah sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pengawasan program pembangunan desa merupakan hal yang diharuskan untuk dilakukan dalam upaya mengawasi jalannya program pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang hendak dilakukan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartini Lasabuda “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa didesa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa didesa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran sesuai dengan RKPDes dari pemerintah Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Buntu Torpedo sudah bisa dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan dan target dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat yang mulai stabil dan sarana infrastruktur yang cukup memadai, sehingga dapat menciptakan kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mensejahterahkan hidup masyarakat, serta dapat membantu mengurangi kesenjangan social dan ekonomi di desa Buntu Torpedo.

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, kemampuan aparat desa yang tergolong cukup baik menjadi salah satu faktor pendukung yang turut menyukseskan pengelolaan alokasi dana desa. Pengelolaan alokasi dana desa sendiri tidak mungkin dapat berjalan secara efektif jika petugas yang bertanggungjawab untuk Faktor pendukung dalam menentukan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo ada empat, yakni kemampuan Aparat Desa, yang dibutuhkan mengelola anggaran kurangteliti maupun cermat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Faktor kedua yang menjadi faktor pendukung dalam efektivitas pengelolaan alokasi dana desa yaitu partisipasi masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan

penggunaan dana desa. Oleh karena itu, tahap ini di letakkan dalam faktor pendukung untuk menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut, dan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat maka akan terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk memajukan desanya sangat tinggi. Partisipasi masyarakat baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dukungan terhadap program-program yang akan dibentuk. Selanjutnya kebijakan pemerintah, yang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan yang terakhir, fasilitas dan infrastruktur yang dimana dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa diperlukan infrastruktur dan fasilitas yang baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Buntu Torpedo.

Untuk menentukan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa juga dapat dilihat dari kesesuaian hasil pembangunan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo sepenuhnya telah melaksanakan program alokasi dana desa yang sesuai dengan RKPDesa dan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Hasil program pembangunan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dan terstruktur sangat diharapkan untuk dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Buntu Torpedo. Namun, dalam hal kepuasan masyarakat secara maksimal bisa saja belum terpenuhi secara

keseluruhan, karena mungkin masih banyak keinginan masyarakat yang belum bisa pemerintah desa untuk penuhi. Tetapi, untuk kepuasan dari program pembangunan yang sudah di nikmati sudah pasti memuaskan dan bisa dikatakan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di desa Buntu Torpedo.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ramlawati “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli” hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2014-2019 sudah berada dalam kategori efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana desa di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo, dimana dalam proses pengelolaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, kemudian pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan pengelolaan ADD di Desa Buntu Torpedo telah efektif, perencanaan dilakukan dengan melakukan musyawarah yang diadakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa, dimana dalam kegiatan musyawarah tersebut melibatkan pihak pemerintah desa dan partisipasi pihak perwakilan masyarakat yang telah terlaksana sebagaimana mestinya. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian telah efektif, dimana pada tahap ini masyarakat desa Buntu Torpedo sangat berpartisipasi aktif. Dalam tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, pemerintah telah mewujudkan prinsip keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Adapun program yang telah terlaksana dengan baik yaitu pembangunan jalan tani, jembatan, rabat beton, dan perbaikan sarana air bersih, serta program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan pemberdayaan perempuan. Pada tahapan pelaporan dan pertanggung jawaban telah efektif, dimana laporan

pertanggungjawaban telah disusun dengan baik oleh pemerintah desa Buntu Torpedo dengan jenis laporan administrasi, dokumentasi, LPJ, LPPD, dan LKPD, serta telah di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kemudian pada tahapan pengawasan juga telah efektif, karena pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan dan pihak anggota BPD itu sudah sangat baik dalam upaya mengawasi jalannya program pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang hendak dilakukan oleh pemerintah desa di desa Buntu Torpedo

2. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo telah efektif, hal tersebut dapat dilihat dari sistem pengelolaan, indikator faktor pendukung yang ada, dan juga dapat dilihat dari kesesuaian hasil pembangunan pelaksanaan program dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Buntu Torpedo dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Keempat tahap tersebut telah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun faktor pendukung dalam menentukan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo itu ada empat, yakni kemampuan aparat desa, partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, serta fasilitas dan infrastruktur. Empat faktor tersebut berpengaruh pada penentuan efektivitas pengelolaan ADD, dimana hal terpenting pada bagian ini terletak pada partisipasi masyarakat desa Buntu

Torpedo yang terbilang sangat aktif. Dalam hal ini pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo sepenuhnya telah melaksanakan program ADD yang sesuai dengan RKPDesa dan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan terselesaikannya program yang telah dilaksanakan, maka hasil program pembangunan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dan terstruktur telah menciptakan kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mensejahterahkan hidup masyarakat, serta dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di desa Buntu Torpedo. kepuasan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Buntu Torpedo.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah desa meningkatkan lagi program sosialisasi terkait kegiatan yang ada di desa Buntu Torpedo agar masyarakat lebih ikut aktif dan berkontribusi dalam mengawal proses Alokasi Dana Desa selanjutnya.
2. Sebaiknya masyarakat desa Buntu Torpedo diharapkan lebih peka lagi dalam kontribusi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, supaya tujuan dan fungsi dapat berjalan secara maksimal serta mampu dipertanggung jawabkan amanah yang telah diperoleh dari masyarakat kepada pemerintah desa.

3. Pemerintah desa perlu membuat tim pengawasan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Pemerintah sebaiknya membuat rencana yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Arno, *Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Islam*.
- Budhi Setianingsih dan Endah Setyowati, “*Efektivitas Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) (Studi pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Malang)*”.
- Burhanuddin, *Pengelolaan organisasi sesuai kepentingannya*.
- Dadang Setiawan, Ekonomi Syari’ah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”.
- Dr. Dies Nurhayati, M.Pd. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Duval Ardiansyah, *Efektifitas pengelolaan keuangan desa Alokasi Dana Desa (ADD) di desa kedayunan kecamatan kabat kabupaten Banyuwangi, Universitas Jember*.
- Emir Ramadhana, *Teori Efektivitas*, Medan Universitas Sumatera Utara.
- Hilmi, Ramlawati “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli*”. *Perencanaan Pembangunan, StieMujahidin Tolitoli*.
- Ike Rus Tanti, *Efektivitas dan Dampak Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, UMM*.
- Freddy Kawatu, Anita Kambey, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.

Minarni Anaci Dethan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana,
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Vol. 7, No.1, hal 15 –
 19

Nova Sulastrri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan
 Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten
 Muna*

Novie Ilya Maharani, *Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan
 Desa Di Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang “*Pedoman Pengelolaan Keuannagn
 Desa*” Pasal 18

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia kontempore*
 (Jakarta: Modern English Press) .

Rahardjo, *Pengantar Sosiologi, Pedesaan Pertanian*, Gadjah Mada University.

Salma, <https://penerbitdeepublish.com/instrumen-penelitian-kualitatif/>

Sartini Lasabuda, Ekonomi dan Bisnis Islam, “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi
 Dana Desa diDesa Borgo Satu Kecamatan Belang Kaupaten Minahasa
 Tenggara*”.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).

Sugiyono, *Metodepenelitian kombinasi*, (Bandung:alfabeta) .

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta) .

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).

Sugiyono, *Metodepenelitian kualitatif*,(cet v bandung).

Sugiyono, *Metodepenelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta)

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta).

Terry, *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*.

Thalha Alhamid dan Budur Anufia *Ekonomi Islam, RESUME:INSTRUMEN
PENGUMPULAN DATA*

Umar, S.E., M.S.E , *Perekonomian Pedesaan Indonesia, Pembangunan
Pedesaan*.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Pedoman Pertanyaan Wawancara

A. Wawancara Kepada Aparat Desa

1. Bagaimana sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo?
2. Bagaimana proses tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo?
3. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo?
5. Pihak -pihak manakah yang dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa?
6. Apakah fasilitas dan infrastruktur pendukung pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup tersedia?
7. Apakah seluruh tahapan dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat terselesaikan dengan baik?
8. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa?
9. Apa saja program kegiatan pembangunan dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
10. Apakah hasil program pembangunan yang telah dibuat dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Buntu Torpedo?
11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
12. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan kepada Desa dalam rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

B. Wawancara Kepada Masyarakat

1. Bagaimana sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo?
2. Apakah Pemerintah Desa telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo?
4. Apa saja program kegiatan pembangunan dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
5. Apakah hasil program pembangunan yang telah dibuat dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Buntu Torpedo?

Lampiran 2 Daftar Informan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	PEKERJAAN	PENDDIDIKAN
1.	Jamiluddin Jasman	L	52	Kepala Desa Buntu Torpedo	SMA
2.	Amalia Safitri S. Kom	P	30	Sekretaris Desa	S1
3.	Armawasi	P	37	Bendahara Desa	SMA
4.	Jabiruddin	L	43	Anggota BPD	
5.	Awi	L	37	Masyarakat Desa Buntu Torpedo	SMA
6.	Darwis	L	51	Masyarakat Desa Buntu Torpedo	SMP
7.	Isa	P	57	Masyarakat Desa Buntu Torpedo	SD
8.	Hasyim Abbas	L	62	Masyarakat Desa Buntu Torpedo	SMA
9.	Fitri	P	25	Masyarakat Desa Buntu Torpedo	SMA
10.	Najewang	P	55	Masyarakat Desa Buntu Torpedo	SMP
11.	Nasir	L	56	Masyarakat Desa Buntu	SMP

				Torpedo	
12.	Anto	L	40	Masyarakat Desa Buntu Torpedo	SMA
13.	Lilis	P	42	Masyarakat Desa Buntu Torpedo	SMP

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01952/00709/SKP/DPMPPTSP/VI/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Aulia Putri beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/187/VI/Bakesbangpol/2024 Tanggal 06 Juni 2024
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Mencetakpan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Aulia Putri
Nomor Telepon : 082298160867
Alamat : Dsn. Durian-Kunyi, Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul Penelitian : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara
Lokasi Penelitian : Buntu Terpedo, Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni s/d 10 Agustus 2024
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

an: **BUPATI LUWU UTARA**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


DR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP. 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01952

Lampiran 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi dengan Bapak Jamiluddin Jasman selaku Kepala Desa Buntu Torpedo



Dokumentasi dengan Ibu Amalia Safitri selaku Sekretaris Desa Buntu Torpedo



Dokumentasi dengan Ibu Armawati selaku Bendahara Desa Buntu Torpedo



Dokumentasi dengan Bapak Jabiruddin selaku Anggota BPD Desa Buntu Torpedo



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Awi selaku Masyarakat Desa Buntu
Torpedo**



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Darwis selaku masyarakat Desa Buntu
Torpedo**



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Isa selaku masyarakat Desa Buntu Torpedo



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Nasir selaku masyarakat Desa
Buntu Torpedo**



**Dokumentasi wawancara dengan Ibu Najewang selaku masyarakat Desa
Buntu Torpedo**



**Dokumentasi wawancara dengan Ibu Fitri selaku masyarakat Desa Buntu
Torpedo**



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hasyim Abbas selaku masyarakat Desa
Buntu Torpedo**

Lampiran 6 Dokumentasi Hasil Pembangunan



Pembentukan jalan tani dan pembangunan irigasi



Pembangunan jembatan beton

Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

Agusalim Sunusi, S.E., M.M.

Burhan Rifuddin, S.E., M.M.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Aulia Putri

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aulia Putri

NIM : 20 0402 0195

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.
(Penguji I)

(.....)
tanggal : 10 / 01 / 2025

2. Agusalim Sunusi, S.E., M.M.
(Penguji II)

(.....)
tanggal : 31 / 01 / 2025

3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M.
(Pembimbing)

(.....)
tanggal : 31 / 01 / 2025

Burhan Rifuddin, S.E., M.M.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Aulia Putri

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aulia Putri

NIM : 20 0402 0195

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing,



Burhan rifuddin, S.E., M.M.
Tanggal : 24 Januari 2025

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Aulia Putri

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Aulia Putri

NIM : 20 0402 0195

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi

1. Agusalim Sanusi, S.E., M.M
tanggal :

2. Eka Widianti, S.E
tanggal : 10/02/2025

(.....)

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
UNIT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo

Web: mahad.iainpalopo.ac.id /Email : mahad@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS MENGAJI

Nomor : 401/In.19/MA.25.02/10/2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Aulia Putri
NIM : 20 0402 0195
Fakultas/Prodi : Ekonomi & Bisnis Islam/ PBS

telah mengikuti ujian mengaji (Menulis dan Membaca) Al-Qur'an dan dinyatakan;

Lulus dengan predikat:

Membaca : ~~Istimewa, Sangat Baik~~, Baik*

Menulis : ~~Istimewa, Sangat Baik~~, Baik*

demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Oktober 2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah



Dr. Mardi Takwim, M.HI.
196805031998031005

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

**IBNU ALI INSTITUTE (IAI) PAMEKASAN
VOCAB LEVEL (VLEV)**

Ponjuk St. Pegantenan, Pamekasan Phone: +6282301820755 www.vlevs.com, Email: vocabmu@gmail.com
No. 21333VL/IAI/TP/III/2024

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Aulia Putri

Date of Birth: 13 Desember 2002

Has participated in the TOEFL Preparation Class held by Vocab Level and successfully achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension:	470
Structure & Written Expression:	450
Reading Comprehension:	490
Total:	470



Under auspices of: Ibnu Ali Institute
At: PAMEKASAN
Date: 10 Mei 2024
Valid until: 10 Mei 2025



No. 1359/In.19/PP.PBAK/09/2020

PBS



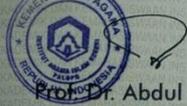
SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA:

Aulia Putri
sebagai:
PESERTA

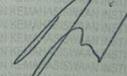
pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
**"Membangun Cara Berpikir Moderat yang Berintegrasi Keilmuan Berciri Kearifan Lokal
untuk Menjaga NKRI Berdasarkan Pancasila"**
yang dilaksanakan pada hari Ahad s.d Selasa 13-15 September 2020
di Institut Agama Islam Negeri Palopo

Rektor IAIN Palopo,



Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Ketua Panitia,



Muhammad Ilyas, S.Ag., MA.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TRANSKRIP NILAI
MAHASISWA PROGRAM MA'HAD AL-JAMI'AH

NAMA : AULIA PUTRI
NIM : 20 0402 0194
FAK/PRODI : FEBI/PBS H

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	Tahsinul Qiro'ah	I	80	B+
2	Fiqih Ibadah	I	80	B+
RATA-RATA			80,00	

Predikat Kelulusan : Amat Baik / Baik / Cukup / Kurang

Palopo, 4 Juli 2021
Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo



Dr. Mardiyatun, M.HI
NIP. 19680503 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahadah

Nomor : In.19/PP/UPT/MA'HAD AL-JAMI'AH/ 022 /VII/2021

Diberikan kepada :

AULIA PUTRI

NIM : 20 0402 0195

Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Juli Dua Ribu Dua Puluh Satu



Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP 19691104 199403 1 004



Dr. Mardi Takwim, M.HI
NIP 19680503 199803 1 005

RIWAYAT HIDUP



Aulia Putri, lahir di Durian Kunyi pada tanggal 13 Desember 2002.

Penulis merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Penulis lahir dari pasangan seorang ayah bernama Munir. L dan ibu Hasna. H.

Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Durian Kunyi Kec.

Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Pada tahun 2014 menyelesaikan

pendidikan Sekolah Dasar di SDN 013 Padang Sarre, Kec. Sabbang, pada tahun yang

sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan selesai pada tahun

2017 di SMPN 4 Sabbang, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di

SMAN 5 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada Program Studi Perbankan

Syariah.

Contact Person Penulis: iniauuull@gmail.com